

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. PENDAHULUAN
a. Gambaran Umum Perangkat Daerah
1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Bidang Ketenagakerjaan
- 1. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja
Sasaran :
 - a. Terserapnya tenaga kerja dipasar kerja
 - b. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing
 - c. Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja
 - 2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja
Sasaran :
 - a. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari bidang ketransmigrasian adalah Pemantapan Transmigrasian dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kesejahteraan transmigran
- b. Terpenuhinya pelayanan dasar transmigran
- c. Meningkatnya produktivitas transmigran

2. Belanja, Program APBD dan Program APBN

Untuk jenis belanja, dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Operasi	Rp.	33.250.593.000
1. Belanja Pegawai	Rp.	24.726.133.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	24.726.133.000
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	7.299.460.000
3. Belanja Hibah	Rp.	
4. Belanja Modal	Rp.	1.225.000.000

Total Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 33.250.593.000,- yang terdiri atas :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	30.877593.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000
AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	26.266.133.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.115.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah	1.125.000.000
Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	1.020.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	631.460.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	340.000.000
Pelaksanaan Latihan Kerja Bedrdasarkan Klaster Kompetensi	340.000.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	705.000.000
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab. Kota	250.000.000
PengelolaanInformasi Pasar Kerja	300.000.000
Perlindungan PMI Di Provinsi	75.000.000
Pengesahan RPTKA Perpanjanganyg Tidak	80.000.000
MengandungPerubahanJabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	243.000.000
Pencegahan dan PenyelesaianPerselisihan HI, MogokKerja dan penutupanperusahaanygberakibat/berdampak pd kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum SektoralProvinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota (UMSK)	143.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	525.000.000
PenyelenggaraanPengawasanKetenagakerjaan	525.000.000
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000
Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	200.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	210.000.000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	210.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.000.000
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	50.000.000

Sedangkan total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.972.742.000,- yang terdiri atas 5 (lima) Satker :

- a) APBN Dekonsentrasi.
 - a.1. Program Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan ProduktiftasBinalovanta sebesar Rp. 1.115.937.000.
 - a.2. Program PeningkatanPemeriksaan Norma Ketenagakerjaansebesar Rp. 376.335.000.
 - a.3. Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Kerja Rp. 889.504.000
 - a.4. Program PenguatanKelembagaan dan PencegahanPerselisihanHubungan Industrial Rp. 359.406.000.
- b) APBN Tugas Pembantuan
 - b.1. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Rp.231.560.000.

3. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan target yang tercantum pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

- 3. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja
- 4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
- 5. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 6. Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan
- 7. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penerapannya
- 8. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya
- 9. Jumlah satuan pemukiman yang dibina

4. Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Kewilayahan
Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Kota Palembang | 10 Kabupaten OKU |
| 2 Kota Prabumulih | 11 Kabupaten OKU Timur |
| 3 Kota LubukLinggau | 12 Kabupaten OKU Selatan |
| 4 Kota Pagar Alam | 13 Kabupaten OKI |
| 5 Kabupaten Ogan Ilir | 14 Kabupaten Banyuasin |
| 6 Kabupaten MUBA | 15 Kabupaten Musi Rawas |
| 7 Kabupaten Lahat | 16 Kabupaten Muratara |
| 8 Kabupaten Muara Enim | 17 Kabupaten PALI |
| 9 Kabupaten Empat Lawang | |

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan.

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI.

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan I ini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program / kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat daerah dan DIPA APBN.

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEU %
Belanja Operasi	32.025.593.000	5.769.718.939	18,02
Belanja Pegawai	24.726.133.000	5.667.785.066	22,92
Belanja Barang Jasa	7.299.460.000	101.933.873	1,40
Belanja Modal	1.225.000.000	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.225.000.000		-
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	-	-	-
Total	33.250.593.000	5.769.718.939	17,35

2) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN Provinsi Sumatera Selatan.

PROGRAM	PAGU	REALISASI		
		KEU (Rp)	%	FISIK %
Dekonsentrasi	2.741.182.000	-	-	
Program Kualtas dan kapasitas kelembagaan Pelatihan Vokasi dan binalovanta	1.115.937.000		-	
Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	376.335.000		-	
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	889.504.000		-	
Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	359.406.000		-	
Tugas Pembantuan	231.560.000	-	-	-
P2KTRANS	231.560.000		-	
	2.972.742.000	-	-	

b. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	42	1,76	4,19
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,5	0,89	35,60
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	80.000.000		
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	42,5	42	98,82
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	45,00	33,13	73,62
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	70	64,32	91,89
7	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kaw	0		
8	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	SP	1	1	100
9	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	SP	1	1	100

c. Penghargaan yang diperoleh perangkat Daerah

- Tahun 2025 belum ada penghargaan yg diperoleh

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi:

- 1 Kegiatan yang bersumber APBN (Dekon dan TP) pada triwulan I (satu) belum terealisasi dikarenakan di blokir
- 2 Sumber Daya Manusia khususnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memasuki masa pensiun sedangkan kaderisasi sangat lambat.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.

1. Mengoptimalkan personil yang tersedia pada Bidang teknis masing-masing, melengkapi tata kelola keuangan dan administrasi satker sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun program kerja beserta timeschedule
2. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada semaksimal mungkin dan mengusulkan penambahan pegawai sesuai bidang ilmu dan kebutuhan teknis Dinas.

IV. PENUTUP.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. PENDAHULUAN
a. Gambaran Umum Perangkat Daerah
1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Bidang Ketenagakerjaan
1. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja
Sasaran :
- a. Terserapnya tenaga kerja dipasar kerja
 - b. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing
 - c. Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja
2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja
Sasaran :
- a. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari bidang ketransmigrasian adalah Pemantapan Transmigrasian dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kesejahteraan transmigran
- b. Terpenuhinya pelayanan dasar transmigran
- c. Meningkatnya produktivitas transmigran

2. Belanja, Program APBD dan Program APBN

Untuk jenis belanja, dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Operasi	Rp.	31.197.330.441
1. Belanja Pegawai	Rp.	26.619.103.317
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	26.619.103.317
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.478.227.124
3. Belanja Hibah	Rp.	
4. Belanja Modal	Rp.	100.000.000

Total Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 31.197.330.441,- yang terdiri atas :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	29.801.148.641
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.363.499.317
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.819.547
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.010.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.829.777
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	68.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	68.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	340.000.000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	340.000.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	333.750.000
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab. Kota	13.750.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	225.000.000
Perlindungan PMI Di Provinsi	50.000.000
Pengesahan RPTKA Perpanjanganyg Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	166.762.000
Pencegahan dan PenyelesaianPerselisihan HI, Mogok Kerja dan penutupanperusahaanygberakibat/berdampak pd kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	73.612.000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum SektoralProvinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota (UMSK)	93.150.000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	284.936.000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	284.936.000
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	103.034.000
Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	103.034.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	70.334.300
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70.334.300
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	29.365.500
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	29.365.500

Sedangkan total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.972.742.000,- yang terdiri atas 5 (lima) Satker :

- a) APBN Dekonsentrasi.
 - a.1. Program Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktiftas Binalovanta sebesar Rp. 1.115.937.000.
 - a.2. Program Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan sebesar Rp. 376.335.000.
 - a.3. Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Kerja Rp.889.504.000
 - a.4. Program Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Rp. 359.406.000.
- b) APBN Tugas Pembantuan
 - b.1. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Rp.231.560.000.

3. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan target yang tercantum pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

- 3. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja
- 4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
- 5. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 6. Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan
- 7. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penerapannya
- 8. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya
- 9. Jumlah satuan pemukiman yang dibina

4. Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagai berikut :

- 1 Kota Palembang

2 Kota Prabumulih

3 Kota LubukLinggau

4 Kota Pagar Alam

5 KabupatenOganIlir

6 Kabupaten MUBA

7 Kabupaten Lahat

8 Kabupaten Muara Enim

9 Kabupaten Empat Lawang
- 10 Kabupaten OKU

11 Kabupaten OKU Timur

12 Kabupaten OKU Selatan

13 Kabupaten OKI

14 KabupatenBanyuasin

15 Kabupaten Musi Rawas

16 Kabupaten Muratara

17 Kabupaten PALI

b. Latar BelakangPenyusunanLaporan.

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI.

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II ini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program / kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat daerah dan DIPA APBN.

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEU %
Belanja Operasi	31.097.330.441	13.451.431.709	43,26
Belanja Pegawai	26.619.103.317	12.508.859.109	46,99
Belanja Barang Jasa	4.478.227.124	942.572.600	21,05
Belanja Modal	100.000.000	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	-	-
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	-	-	-
Total	31.197.330.441	13.451.431.709	43,12

2) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN Provinsi Sumatera Selatan.

PROGRAM	PAGU	REALISASI		
		KEU (Rp)	%	FISIK %
Dekonsentrasi	2.741.182.000	-	-	
Program Kualtas dan kapasitas kelembagaan Pelatihan Vokasi dan binalovanta	1.115.937.000		-	
Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	376.335.000		-	
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	889.504.000		-	
Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	359.406.000		-	
Tugas Pembantuan	231.560.000	-	-	-
P2KTRANS	231.560.000		-	
	2.972.742.000	-	-	

b. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	47	-	-
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,55	-	-
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	80.100.000	-	-
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	43	-	-
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	47	-	-
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	72	-	-
7	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kaw	0	-	-
8	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	SP	1	-	-
9	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	SP	1	-	-

c. Penghargaan yang diperoleh perangkat Daerah

- Tahun 2025 belum ada penghargaan yg diperoleh

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi:

- 1 Kegiatan yang bersumber APBN (Dekon dan TP) pada triwulan II (satu) belum terealisasi dikarenakan di blokir
- 2 Sumber Daya Manusia khususnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memasuki masa pensiun sedangkan kaderisasi sangat lambat.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.

1. Mengoptimalkan personil yang tersedia pada Bidang teknis masing-masing, melengkapi tata kelola keuangan dan administrasi satker sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun program kerja beserta timeschedule
2. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada semaksimal mungkin dan mengusulkan penambahan pegawai sesuai bidang ilmu dan kebutuhan teknis Dinas.

IV. PENUTUP.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. PENDAHULUAN
a. Gambaran Umum Perangkat Daerah
1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Bidang Ketenagakerjaan
1. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja
Sasaran :
- a. Terserapnya tenaga kerja dipasar kerja
 - b. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing
 - c. Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja
2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja
Sasaran :
- a. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari bidang ketransmigrasian adalah Pemantapan Transmigrasian dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kesejahteraan transmigran
- b. Terpenuhinya pelayanan dasar transmigran
- c. Meningkatnya produktivitas transmigran

2. Belanja, Program APBD dan Program APBN

Untuk jenis belanja, dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Operasi	Rp.	31.197.330.441
1. Belanja Pegawai	Rp.	26.619.103.317
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	26.619.103.317
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.478.227.124
3. Belanja Hibah	Rp.	
4. Belanja Modal	Rp.	100.000.000

Total Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 31.197.330.441,- yang terdiri atas :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	29.801.148.641
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000
AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	27.363.499.317
AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah	115.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.819.547
Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	1.010.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	585.829.777
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	68.000.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	68.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	340.000.000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	340.000.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	333.750.000
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab. Kota	13.750.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	225.000.000
Perlindungan PMI Di Provinsi	50.000.000
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yg Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	166.762.000
Pencegahan dan PenyelesaianPerselisihan HI, MogokKerja dan penutupanperusahaanygberakibat/berdampak pd kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	73.612.000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum SektoralProvinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum SektoralKabupaten/Kota (UMSK)	93.150.000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	284.936.000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	284.936.000
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	103.034.000
Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	103.034.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	70.334.300
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70.334.300
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	29.365.500
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	29.365.500

Sedangkan total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.972.742.000,- yang terdiri atas 5 (lima) Satker :

- a) APBN Dekonsentrasi.
 - a.1. Program Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktiftas Binalovanta sebesar Rp. 1.115.937.000.
 - a.2. Program Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan sebesar Rp. 376.335.000.
 - a.3. Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Kerja Rp.889.504.000
 - a.4. Program Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Rp. 359.406.000.
- b) APBN Tugas Pembantuan
 - b.1. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Rp.231.560.000.

3. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan target yang tercantum pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

- 3. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja
- 4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
- 5. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 6. Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan
- 7. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penerapannya
- 8. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya
- 9. Jumlah satuan pemukiman yang dibina

4. Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Kewilayahan
Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Kota Palembang | 10 Kabupaten OKU |
| 2 Kota Prabumulih | 11 Kabupaten OKU Timur |
| 3 Kota LubukLinggau | 12 Kabupaten OKU Selatan |
| 4 Kota Pagar Alam | 13 Kabupaten OKI |
| 5 Kabupaten Ogan Ilir | 14 Kabupaten Banyuasin |
| 6 Kabupaten MUBA | 15 Kabupaten Musi Rawas |
| 7 Kabupaten Lahat | 16 Kabupaten Muratara |
| 8 Kabupaten Muara Enim | 17 Kabupaten PALI |
| 9 Kabupaten Empat Lawang | |

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan.

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI.

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan III ini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program / kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat daerah dan DIPA APBN.

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEU %
Belanja Operasi	31.097.330.441	18.650.333.632	59,97
Belanja Pegawai	26.619.103.317	16.950.906.989	63,68
Belanja Barang Jasa	4.478.227.124	1.699.426.643	37,95
Belanja Modal	100.000.000	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	-	-
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	-	-	-
Total	31.197.330.441	18.650.333.632	59,78

2) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN Provinsi Sumatera Selatan.

PROGRAM	PAGU	REALISASI		
		KEU (Rp)	%	FISIK %
Dekonsentrasi	2.741.182.000	-	-	
Program Kualitas dan kapasitas kelembagaan Pelatihan Vokasi dan binalovanta	1.115.937.000		-	
Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	376.335.000		-	
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	889.504.000		-	
Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	359.406.000		-	
Tugas Pembantuan	231.560.000	-	-	-
P2KTRANS	231.560.000		-	
	2.972.742.000	-	-	

b. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	47	-	-
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,55	-	-
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	80.100.000	-	-
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	43	-	-
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	47	-	-
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	72	-	-
7	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kaw	0	-	-
8	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	SP	1	-	-
9	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	SP	1	-	-

c. Penghargaan yang diperoleh perangkat Daerah

- Tahun 2025 belum ada penghargaan yg diperoleh

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi:

- 1 Kegiatan yang bersumber APBN (Dekon dan TP) pada triwulan III (satu) belum terealisasi dikarenakan di blokir
- 2 Sumber Daya Manusia khususnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memasuki masa pensiun sedangkan kaderisasi sangat lambat.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.

1. Mengoptimalkan personil yang tersedia pada Bidang teknis masing-masing, melengkapi tata kelola keuangan dan administrasi satker sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun program kerja beserta timeschedule
2. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada semaksimal mungkin dan mengusulkan penambahan pegawai sesuai bidang ilmu dan kebutuhan teknis Dinas.

IV. PENUTUP.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IVTAHUN ANGGARAN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. PENDAHULUAN
a. Gambaran Umum Perangkat Daerah
1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dari urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Bidang Ketenagakerjaan
- 1. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja
Sasaran :
 - a. Terserapnya tenaga kerja dipasar kerja
 - b. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing
 - c. Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja
 - 2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja
Sasaran :
 - a. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari bidang ketransmigrasian adalah Pemantapan Transmigrasian dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kesejahteraan transmigran
- b. Terpenuhinya pelayanan dasar transmigran
- c. Meningkatnya produktivitas transmigran

2. Belanja, Program APBD dan Program APBN

Untuk jenis belanja, dapat diuraikan sebagai berikut :

Belanja Operasi	Rp.	30.266.982.124
1. Belanja Pegawai	Rp.	25.688.755.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	25.688.755.000
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	4.558.227.124
3. Belanja Hibah	Rp.	
4. Belanja Modal	Rp.	20.000.000

Total Pagu Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 30.266.982.124,- yang terdiri atas :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	28.945.800.324
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.448.151.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	40.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat daerah	411.819.547
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	20.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	780.829.777
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	340.000.000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi	340.000.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	333.750.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	225.000.000
Perlindungan PMI Di daerah Provinsi	50.000.000
Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi dalam 1 Daerah Provinsi	45.000.000
 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	 166.762.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan penutupan perusahaan yg berakibat/berdampak pd kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	73.612.000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	93.150.000
 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	 317.936.000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	317.936.000
 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	 133.368.300
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	133.368.300
 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	 29.365.500
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	29.365.500

Sedangkan total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.972.742.000,- yang terdiri atas 5 (lima) Satker :

- a) APBN Dekonsentrasi.
 - a.1. Program Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Binalovanta sebesar Rp. 1.115.937.000.
 - a.2. Program Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan sebesar Rp. 376.335.000.
 - a.3. Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Kerja Rp.889.504.000
 - a.4. Program Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Rp. 359.406.000.
- b) APBN Tugas Pembantuan
 - b.1. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Rp.3.169.072.000.

3. Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan target yang tercantum pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

- Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
- Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja
- Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

- 5. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 6. Persentase Perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan
- 7. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penerapannya
- 8. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya
- 9. Jumlah satuan pemukiman yang dibina

4. Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Kewilayahan

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, sebagai berikut :

- 1 Kota Palembang

2 Kota Prabumulih

3 Kota LubukLinggau

4 Kota Pagar Alam

5 KabupatenOganIlir

6 Kabupaten MUBA

7 Kabupaten Lahat

8 Kabupaten Muara Enim

9 Kabupaten Empat Lawang
- 10 Kabupaten OKU

11 Kabupaten OKU Timur

12 Kabupaten OKU Selatan

13 Kabupaten OKI

14 KabupatenBanyuasin

15 Kabupaten Musi Rawas

16 Kabupaten Muratara

17 Kabupaten PALI

b. Latar BelakangPenyusunanLaporan.

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA TRIWULAN INI.

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan IV ini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program / kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat daerah dan DIPA APBN.

1) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBD Provinsi Sumatera Selatan.

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KEU %
Belanja Operasi	30.246.982.124	25.453.147.128	84,15
Belanja Pegawai	25.688.755.000	22.435.539.088	87,34
Belanja Barang Jasa	4.558.227.124	3.017.608.040	66,20
Belanja Modal	20.000.000	19.980.000	99,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	19.980.000	99,90
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	-	-	-
Total	30.266.982.124	25.473.127.128	84,16

2) Realisasi Belanja Perangkat Daerah dana APBN Provinsi Sumatera Selatan.

PROGRAM	PAGU	REALISASI		
		KEU (Rp)	%	FISIK %
Dekonsentrasi	2.741.182.000	-	-	
Program Kualtas dan kapasitas kelembagaan Pelatihan Vokasi dan binalovanta	1.115.937.000		-	
Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	376.335.000		-	
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	889.504.000		-	
Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	359.406.000		-	
Tugas Pembantuan	3.169.072.000	1.517.569.030	47,89	-
P2KTRANS	3.169.072.000	1.517.569.030	47,89	
	5.910.254.000	1.517.569.030	25,68	

b. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	47	-	-
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,55	-	-
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	80.100.000	-	-
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	43	-	-
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	47	-	-
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	72	-	-
7	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kaw	0	-	-
8	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	SP	1	-	-
9	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	SP	1	-	-

c. Penghargaan yang diperoleh perangkat Daerah

- Tahun 2025 ada penghargaan yg diperoleh Naker award indek pembangunan ketenagakerjaan kategori besar

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala yang dihadapi:

- 1 Kegiatan yang bersumber APBN (Dekon) pada triwulan IV (empat) belum terealisasi dikarenakan di blokir
- 2 Sumber Daya Manusia khususnya pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidang teknis yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memasuki masa pensiun sedangkan kaderisasi sangat lambat.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.

1. Mengoptimalkan personil yang tersedia pada Bidang teknis masing-masing, melengkapi tata kelola keuangan dan administrasi satker sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun program kerja beserta timeschedule
2. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada semaksimal mungkin dan mengusulkan penambahan pegawai sesuai bidang ilmu dan kebutuhan teknis Dinas.

IV. PENUTUP.